



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SATU DATA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DAERAH SECARA ELEKTRONIK**

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyajikan data dan informasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta selaras dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka upaya pemerintah dalam menyediakan data dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, dan terpadu, sehingga dapat memberikan aksesibilitas bagi masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan data;
- c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menettapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penyelenggaraan Satu Data Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor adalah Kepala pada Perangkat Daerah yang memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaporkan kebutuhan data akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas/Badan/Kantor yang bertanggungjawab dalam penginputan data akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Nunukan.
8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
9. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
10. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
11. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
12. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah tertentu yang memiliki tugas fungsi dan kewenangan untuk melaksanakannya.

13. Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah tim pendampingan, penyusun dan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Nunukan.
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah pejabat fungsional pada inspektorat Kabupaten Nunukan.
15. Reviu adalah penelusuran bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, data keuangan dan sebagainya.
17. *Portable Document Format* yang selanjutnya disingkat PDF adalah format berkas dokumen secara digital.
18. Satu Data Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Secara Elektronik adalah Pengumpulan Data yang dilakukan secara daring (dalam jaringan) melalui Aplikasi “SEPAKAT”:
19. “SEPAKAT” adalah Akronim dari Sinergitas Perangkat Daerah dalam Akuntabilitas Kepala Daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Penyelenggaraan Satu Data Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Secara Elektronik sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka mengumpulkan data kinerja yang terintegrasi, Spesifik, Terukur, Akurat, Lengkap, Representatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai proses pelaporan dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 3

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Satu Data Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Secara Elektronik meliputi pengaturan:

- a. Pengumpulan Data Kinerja;
- b. Sumber Data Kinerja;
- c. Verifikasi dan Penilaian Data Kinerja;
- d. Prosedur Input Data Kinerja;
- e. Penggunaan Data Kinerja;
- f. Penanggungjawab Data Kinerja; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pasal 4

Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meliputi:

- a. LPPD;
- b. LKPJ;
- c. RLPPD; dan
- d. SPM.

BAB IV
SUMBER DATA KINERJA

Pasal 5

- (1) Pengumpulan Data Kinerja dapat diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber Data Utama, yaitu:
 - a. Sumber data Internal; dan
 - b. Sumber data Eksternal.
- (2) Data Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan data yang berasal dari Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan legalitas stempel instansi dan tanda tangan kepala perangkat daerah;
- (3) Data Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan data yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik atau instansi terkait lainnya dengan legalitas stempel instansi dan tanda tangan Pimpinan Instansi penyedia data.

BAB V
VERIFIKASI DAN PENILAIAN DATA KINERJA

Pasal 6

- (1) Verifikasi dan penilaian dokumen data capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah bersama APIP inspektorat daerah.
- (2) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.
- (3) Data dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah jika:
 - a. data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data; dan
 - c. metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan.

- (4) Hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP inspektorat daerah dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

BAB VI PROSEDUR INPUT DATA KINERJA

Pasal 7

Prosedur pengisian (Input) Data Kinerja Perangkat Daerah ke dalam Aplikasi “SEPAKAT”, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data Indikator Kinerja dilakukan setiap triwulan, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas menyiapkan Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya untuk disampaikan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor melalui Sekretaris;
- b. Pengumpulan Data Kinerja dilakukan melalui Input Data kedalam Sistem Aplikasi “SEPAKAT” dengan melampirkan data dukung dalam bentuk dokumen PDF.
- c. Pengumpulan data indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.

Pasal 8

Uraian Indikator Kinerja Kunci sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGUNAAN DATA KINERJA

Pasal 9

- (1) Data Kinerja yang sudah dikompilasi dan ditabulasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c, diterbitkan melalui Aplikasi “SEPAKAT”.
- (2) Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Data Publik yang dapat diakses melalui Aplikasi “SEPAKAT” oleh Para Pemangku Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pengukuran, monitoring maupun evaluasi kinerja.

BAB VIII PENANGGUNG JAWAB DATA KINERJA

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab pengumpulan data kinerja di lingkungan Perangkat Daerah adalah Sekretaris Perangkat Daerah.
- (2) Sekretaris perangkat daerah melaporkan perkembangan data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulan, semesteran dalam hal proses kegiatan pengumpulan data kinerja maupun capaian data kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan kepada kepala perangkat daerah.
- (3) Kegagalan dan keberhasilan capaian target data kinerja menjadi tanggungjawab kepala perangkat daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Data Kinerja dilakukan oleh Bupati Nunukan melalui Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris;
 - d. Inspektur Inspektorat selaku Anggota;
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan selaku Anggota;
 - f. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah selaku Anggota; dan
 - g. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana selaku anggota.
- (3) Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 8



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SATU DATA
 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
 SECARA ELEKTRONIK

FORMULIR KOMPILASI DATA KINERJA

Tahun :
 Bulan :
 Unit :
 Kerja

No	Indikator Kinerja	Target	Progres Capaian	Program Kegiatan	Yang Membedangi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan

- Tahun : Ditulis dengan tahun pada saat pengumpulan data.
- Bulan : Ditulis dengan bulan pada saat pengumpulan data.
- Unit Kerja : Ditulis dengan nama unit kerja pengumpul data.
- Kolom 1 : Ditulis dengan nomor urut.
- Kolom 2 : Ditulis dengan Indikator Kinerja.
- Kolom 3 : Ditulis dengan Target Capaian ditahun berjalan.
- Kolom 4 : Ditulis dengan Progres Capaian indikator kinerja pada bulan pengumpulan data
- Kolom 5 : Ditulis Uraian Program/Kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis/Renja SKPD yang telah menjadi DPA
- Kolom 6 : Ditulis dengan Bidang pada Unit Kerja yang membidangi Indikator Kinerja.
- Kolom 7 : Ditulis analisis ringkas hambatan/masalah dalam progres pencapaian indikator kinerja maupun dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan Dalam Renja SKPD yang telah menjadi DPA.

INDIKATOR KINERJA UNTUK EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. EPPD terdiri atas 2 (dua) jenis evaluasi antara lain:

1. Evaluasi Kinerja Makro

Evaluasi Kinerja Makro dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD dan perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD. Evaluasi Kinerja Makro dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja makro yang sama untuk provinsi, kabupaten dan kota, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Bobot Indikator
1.	Indeks Pembangunan Manusia	20%
2.	Angka kemiskinan	20%
3.	Angka pengangguran	15%
4.	Pertumbuhan ekonomi	10%
5.	Pendapatan per kapita	15%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20%

2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut: Kabupaten/Kota

1) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan

Dasar a) Pendidikan (Bobot Urusan : 5%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 5. Jumlah pendidik pada PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD $\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100 \%$	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini</p> <p>6. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	berwenang			
2.	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan	25%
3.	3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p data-bbox="548 269 1016 472">jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p data-bbox="470 493 1016 639">6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar</p> <p data-bbox="470 660 1016 807">7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p data-bbox="470 828 1016 922">8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar</p> <p data-bbox="470 943 1016 1089">9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p data-bbox="470 1110 1016 1256">10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</p> <p data-bbox="470 1278 1016 1320">11. jumlah kebutuhan minimal</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</p> <p>13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> <p>15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			
4.	<p>1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi</p> <p>2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> <p>3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan</p>	<p>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</p>	<p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan</p>	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
5.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan			
6.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)			
7.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
8.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1			

b) Kesehatan (Bobot Urusan : 6%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di kabupaten/kota}} \times 100 \%$	7%
2.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di kabupaten/kota}} \times 100 \%$	7%
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal 	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota}} \times 100 \%$	7%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
4.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	7%
5.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	7%
6.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di kabupaten/kota	7%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
7.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	7%
8.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	7%
9.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	7%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
10.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	7%
11.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	7%
12.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	7%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
13.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	7%
14.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	7%

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bobot Urusan : 6%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)</p> <p>2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)</p> <p>3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)</p>	<p>Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota</p>	<p>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</p>	10%
2.	<p>4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)</p>	<p>Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota</p>	<p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman</p>	10%

	<p>5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota</p> <p>6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota</p> <p>7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota</p>		<p>sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)</p>	
3.	<p>1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik</p> <p>2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik</p> <p>3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik</p>	<p>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</p>	<p>Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting</p> <p>----- x 100 %</p> <p>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota</p>	10%

4.	<p>1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)</p> <p>2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)</p> <p>3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)</p> <p>4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM</p> <p>5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.</p>	<p>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.</p>	20%
----	---	--	--	-----

5.	<p>1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S</p> <p>2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T</p> <p>3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T</p>	<p>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</p>	<p>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah rumah di Kabupaten A</p>	20%
----	---	--	--	-----

	<p>4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja</p> <p>5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja</p> <p>6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik</p> <p>7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar</p> <p>8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman</p> <p>9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman</p>			
--	---	--	--	--

	<p>10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat</p> <p>11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja</p> <p>12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja</p> <p>13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD</p> <p>14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja</p>			
6.	<p>1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi</p> <p>2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting</p>	<p>Rasio kepatuhan IMB kab/ kota</p>	<p>Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah IMB yang berlaku</p>	10%

	<p>3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)</p> <p>4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)</p> <p>5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan</p> <p>6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi</p> <p>7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota</p>			
--	---	--	--	--

	8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat			
7.	<p>1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota</p> <p>2. Panjang jalan yang dibangun</p> <p>3. Panjang jembatan yang dibangun</p> <p>4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)</p> <p>5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan</p> <p>6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi</p> <p>7. Panjang jembatan yang direhabilitasi</p>	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	<p>Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota</p>	10%

	<p>8. Panjang jalan yang dipelihara</p> <p>9. Panjang jembatan yang dipelihara</p>			
8.	<p>1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota</p> <p>2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota</p> <p>3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota</p> <p>4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir</p>	<p>Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</p>	<p>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota</p>	10%

	<p>5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota</p> <p>6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN</p> <p>7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya</p>			
--	--	--	--	--

	<p>8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala</p> <p>9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota</p> <p>10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang</p>			
--	--	--	--	--

	<p>diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.</p> <p>11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis</p> <p>12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota</p>			
--	--	--	--	--

	<p>13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota</p> <p>14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p>			
--	--	--	--	--

	<p>16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota</p> <p>19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota</p>			
--	--	--	--	--

	<p>20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota</p> <p>21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota</p> <p>22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p>			
--	---	--	--	--

	<p>24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p>			
		<p>Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</p>	<p>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi ----- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p>	

d) Perumahan Rakyat (Bobot Urusan : 6%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya</p> <p>2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam</p> <p>3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam</p> <p>4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi</p> <p>5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi</p> <p>6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun</p>	<p>Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n</p>	20%

	<p>baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi</p> <p>7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana</p> <p>8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi</p> <p>9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan</p>			
2.	<p>1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan</p>	<p>Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota</p>	<p>Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total rumah tangga</p>	20%

	<p>fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana</p>		<p>terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</p>	
--	---	--	---	--

	<p>memenuhi SPM</p> <p>6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah</p>			
3.	<p>1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha</p> <p>2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH</p> <p>3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh</p>	<p>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</p>	<p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha</p>	20%
4.	<p>1. Jumlah rumah di kab/kota</p> <p>2. Jumlah unit PK RTLH</p> <p>3. Jumlah rumah tidak layak huni</p> <p>4. Jumlah rumah yang tidak dihuni</p> <p>5. Rasio rumah dan KK</p> <p>6. Jumlah rumah pembangunan baru</p>	<p>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</p>	<p>Jumlah unit rumah tidak layak huni</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota</p>	20%

5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) 5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi 8. Jumlah pengembang yang terregistrasi 9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan 	<p>Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</p>	<p>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah unit rumah kab/kota</p>	20%
----	--	---	--	-----

e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Bobot Urusan : 6%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani</p> <p>2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan</p> <p>3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan</p> <p>4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS</p> <p>5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum</p> <p>6. Tersedianya sarana prasarana minimal</p>	<p>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</p>	<p>Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100 %</p> <p>Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk</p>	14%
2.		<p>Persentase Perda dan Perkada yang</p>	<p>Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan</p>	14%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
		ditegakkan	----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuatsanksi	
3.	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	14%
4.	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	14%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan</p> <p>5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana</p> <p>6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan</p>			
5.	<p>1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB</p> <p>2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana</p>	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p>	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p>	14%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</p> <p>4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana</p>			
6.	<p>1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota</p> <p>2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar,</p>	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk	14%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan</p> <p>3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan</p> <p>4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa</p> <p>5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi</p> <p>6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud</p>		<p>dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota</p>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran</p> <p>7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran</p> <p>8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran</p>			
7.		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	14%

f) Sosial (Bobot Urusan : 6%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki 2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	dimiliki			
6.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi			
7.	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar			
8.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang			
9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu			
	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter			
	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia			
	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			
	13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah			
	14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>dan/atau relawan sosial yang disediakan</p> <p>15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial</p> <p>16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat</p> <p>17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan</p> <p>18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar</p> <p>19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga</p> <p>20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga</p> <p>21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk</p>			
2.	<p>1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan</p> <p>2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang</p> <p>3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki</p>	<p>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan</p>	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan</p> <p>5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial</p> <p>6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia</p>		<p>jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</p>	

2) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar a)

Tenaga Kerja (Bobot Urusan : 3%)

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.</p> <p>2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.</p> <p>3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.</p>	<p>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</p>	<p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota</p>	
2.	<p>1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster</p> <p>2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi</p> <p>3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan</p> <p>4. Persentase LPK yang terakreditasi</p> <p>5. Persentase LPK yang memiliki perizinan</p>	<p>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</p>	<p>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah tenaga kerja keseluruhan</p>	25%

	<p>6. Jumlah penganggur yang dilatih</p> <p>7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan</p> <p>8. Persentase penyerapan lulusan</p> <p>9. Lulusan bersertifikat kompetensi</p> <p>10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan</p> <p>11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)</p>			
3.	<p>1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas</p> <p>2. Data tingkat produktivitas total</p> <p>3.</p>	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	<p>PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah tenaga kerja</p>	25%

4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) 2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan 4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah. 5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 	<p>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).</p>	<p>Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Perusahaan</p>	25%
----	---	--	--	-----

	<p>6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih</p> <p>7. Jumlah mogok kerja</p> <p>8. Jumlah penutupan perusahaan</p> <p>9. Jumlah perselisihan kepentingan</p> <p>10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan</p> <p>11. Jumlah perselisihan PHK</p> <p>12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK</p> <p>13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite</p> <p>14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan</p>			
--	--	--	--	--

	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial			
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota 3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota 4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota 5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 	<p>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah pencaker yang terdaftar</p>	25%

	<p>Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota</p> <p>7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.</p> <p>8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)</p> <p>9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi</p> <p>10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata</p>			
--	---	--	--	--

	<p>11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan</p> <p>12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja</p> <p>13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya</p> <p>14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk</p>			
--	--	--	--	--

g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG</p> <p>2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota</p>	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	<p>Jumlah ARG pada belanja langsung APBD</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh belanja langsung APBD</p>	33%
2.	<p>1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak</p> <p>2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</p>	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	<p>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)</p>	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani</p> <p>4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan</p> <p>5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)</p>			
3.	<p>1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan</p> <p>2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota</p>	<p>Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</p>	<p>Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>yang sudah dilatih</p> <p>3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan</p> <p>4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota</p> <p>5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi</p> <p>6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani			

h) Pangan (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan</p> <p>2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya</p> <p>3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal</p> <p>4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan</p>	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$	100%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang</p> <p>5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan</p> <p>6. Tertanganinya kerawanan pangan</p> <p>7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan</p> <p>8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar</p>			

i) Pertanahan (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek <i>Landreform</i> yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi ----- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi	
2.	3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	
3.	4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	Kabupaten/Kota		----- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan	
4.		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	
5.		Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	
6.		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100%	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
		mediasi	jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	

j) Lingkungan Hidup(Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		33%
2.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Total Vol sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Total vol timbunan sampah kabupaten/kota	33%
3.	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	pemerintah daerah kabupaten/kota	kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota ----- x 100% usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	
2.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota			
3.	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota			
4.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat			
5.	Penanganan Pengaduan			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.			

k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	25%
2.		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
		Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	25%
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah OPD	25%

1) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	50%
2.		Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	

m) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age	TFR (Angka Kelahiran Total)		33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)</p> <p>4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)</p> <p>5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK</p>			
2.	<p>1. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP</p> <p>2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p>	<p>Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)</p>	<p>Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur</p>	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPk yang efektif 4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan			
3.	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	33%

n) Perhubungan (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>2. Terlaksananya pelayanan uji berkala</p> <p>3. Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi</p> <p>4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota</p>		<p>penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) ○ IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) <p>Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan)</p>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p data-bbox="1373 873 1908 963">IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik 	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			<p>lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan 	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			<p>dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5	
2.		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	50%

o) Komunikasi dan Informatika (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	35%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo</p> <p>3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah</p>			
3.	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	<p>Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Layanan Publik</p>	35%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015</p> <p>2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</p> <p>3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan</p> <p>4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>telah diimplementasikan secara elektronik</p> <p>5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</p> <p>6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</p> <p>8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah			
	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)			
	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai			
	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city			
	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo			
	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	kepala daerah terkait implementasi e-government			
3	<p>4. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota</p> <p>5. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)</p> <p>6. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan</p>	<p>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota ----- x 100%</p> <p>Jumlah penduduk</p>	30%

p) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam</p>	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	<p>Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh koperasi</p>	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>daerah kabupaten/kota</p> <p>4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</p> <p>9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
	11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
2.	<p>1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro</p> <p>2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem <i>online data system</i> (ODS)</p> <p>3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra</p> <p>4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha</p> <p>5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan</p>	<p>Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha</p>	<p>Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100%</p> <p>Jumlah usaha mikro keseluruhan</p>	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	dukungan fasilitasi pemasaran 6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan			

q) Penanaman Modal (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1} \times 100\%$	100%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>fasilitas insentif penanaman modal</p> <p>3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal</p> <p>4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting</p> <p>5. Kegiatan pameran penanaman modal</p> <p>6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal</p> <p>7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal</p> <p>8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal</p> <p>9. Laporan realisasi penanaman modal</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota			
	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN			
	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota			

r) Kepemudaan dan Olahraga (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi ----- x 100%	33%
	2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	
2.	1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader	Tingkat partisipasi pemuda dalam	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda</p> <p>2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan</p>	<p>organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</p>	<p>organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota</p> <p>----- x 100%</p> <p>jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota</p>	
3.	<p>1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan</p> <p>2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah</p>	<p>Peningkatan prestasi olahraga</p>	<p>Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional</p>	33%

s) Statistik (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Tersedianya buku profil daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD	50%
	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan			
	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan			
	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS			
	5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD	50%
	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik			
	7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik			

t) Persandian (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan</p> <p>2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah</p> <p>3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan</p>	Tingkat keamanan informasi pemerintah	<p>Jumlah nilai per area keamanan informasi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah area penilaian</p>	100%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>resiko kategori rendah</p> <p>4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan</p>			

u) Kebudayaan(Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)</p> <p>2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang</p>	<p>Terlestarikannya Cagar Budaya</p>	<p>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah cagar budaya yang terdata</p>	100%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)</p> <p>3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)</p> <p>4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)</p> <p>5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>penetapan, pencatatan, pemerinkatan, penghapusan)</p> <p>6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran</p> <p>7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data</p> <p>8. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)</p> <p>9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)</p> <p>10. Pengelolaan, pengamanan,</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			
11.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan			
12.	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota			
13.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya			
14.	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi			
15.	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya			
16.	Pemetaan sdm cagar budaya			

	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>dan permuseuman</p> <p>17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota</p> <p>18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman</p> <p>19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat</p>			

v) Perpustakaan (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		50%
	2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh	2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>masyarakat</p> <p>3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk</p> <p>4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</p> <p>5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat</p>			
2.	<p>1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya</p> <p>2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa</p> <p>3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)			

w) Kearsipan (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</p> <p>2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</p> <p>3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</p> <p>4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	<p>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>$T = (a + i + s + j) / 4$</p> <p>T = tingkat ketersediaan arsip</p> <p>a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip</p> <p>i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip</p> <p>s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</p> <p>j = persentase jumlah arsip</p>	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	
2.	<p>1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK</p> <p>2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK</p> <p>3. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi</p> <p>4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK</p> <p>5. Pencarian arsip statis yang</p>	<p>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</p>	<p>$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$</p> <p>T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</p> <p>m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</p> <p>b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah</p>	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK</p> <p>6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK</p>		<p>kabupaten/kota dengan NSPK</p> <p>a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	

3) Urusan Pilihan

a) Kelautan dan Perikanan (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)</p> <p>2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional</p> <p>3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan</p> <p>4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan</p>	<p>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)</p>	<p>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)</p>	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) 5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi			

b) Pariwisata (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	20%
2.	3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	20%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun n-1	
3.	5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia	20%
	6. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi			
4.	7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	20%
5.	8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	20%
	9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			

c) Pertanian (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{luas panen}} \times 100\%$	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
2.	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$	50%

d) Kehutanan (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			

e) Energi dan Sumber Daya Mineral (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	100%

f) Perdagangan (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan 2. Persentase penerbitan TDG 3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG 4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : 5. Persentase pemeriksaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota}} \times 100\%$	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota</p> <p>6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu</p> <p>7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</p> <p>8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu</p>			
2.	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	33%
3.	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	$\frac{\text{jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{-----}} \times 100\%$	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	bertanda tera sah yang berlaku	jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	

g) Perindustrian (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	17%
2.	1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator		17%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
		pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		

3.	<p>1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan</p> <p>2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan</p>	<p>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</p>	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah izin yang dikeluarkan</p>	17%
4.		<p>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</p>	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah izin yang dikeluarkan</p>	17%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
5.		<p>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah izin yang dikeluarkan</p>	17%

6.	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan Informasi produksi dan kapasitas produksi Informasi bahan baku dan bahan penolong Informasi bahan bakar/energy Informasi tenaga kerja	17%
----	---	---	---	-----

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			Informasi investasi	

h) Transmigrasi (Bobot Urusan : 1%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya 2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina			

4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Bobot : 10%)

a) Perencanaan dan Keuangan (Bobot Urusan : 30%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100 \%$	16.7%
2.		Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah APBD non migas}} \times 100\%$	16.7%
3.		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	16.7%
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	16.7%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
4.		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----- X 100% jumlah belanja APBD	16.7%
5.		Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	16.7%

b) Pengadaan (Bobot Urusan : 10%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n	33%
2.		Persentase jumlah pengadaan yang	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
		dilakukan dengan metode kompetitif	----- X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	
3.		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- X 100% total belanja langsung	33%

c) Kepegawaian (Bobot Urusan : 20%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ----- X 100% Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	33%
2.		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- X 100%	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	
3.		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	33%

d) Manajemen Keuangan (Bobot Urusan : 20%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- X 100% total belanja APBD dikurangi satu	25%
2.		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi ----- X 100% dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
3.		Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	25%
4.		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA ----- X 100% total belanja anggaran tahun sebelumnya	25%

e) Transparansi dan Partisipasi Publik (Bobot Urusan : 20%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- X 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	50%
2.		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- X 100% total jumlah dokumen yang telah dirinci	50%

**TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

1. PENDIDIKAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)			
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			

2. KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan			
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan			
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan			
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan			
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar			

	dasar	yang mendapatkan layanan kesehatan			
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan			
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan			
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan			
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan			
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan			
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan			
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan			

3. PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok			

		air minum sehari-hari			
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			

4. PERUMAHAN RAKYAT

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni hari			
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			

5. TRANTIBUMLINMAS

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada			
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			

4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran			

6. SOSIAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN
TARGET PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	1	PDRB sektor pertanian	22.65%
		2	PDRB sektor perdagangan	6.58%
2	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur yang layak	3	Persentase peningkatan kualitas jalan yang terbangun dalam kondisi baik	66.20%
		4	Persentase Peningkatan areal lahan yang dialiri jaringan irigasi	57%
3	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	5	Persentase Desa yang terhubung dengan moda transportasi	22,86%
4	Meningkatnya Investasi Daerah	6	Nilai Realisasi Investasi (Milyaran Rupiah)	1.325.000.000.000
5	Meningkatnya Status Desa	7	Jumlah Desa Mandiri	1
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup (IKLH)	8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,00
7	Menurunnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah	9	Indeks Gini	0.27
		10	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,74
8	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	82.45
		12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,28
9	Meningkatnya Aksebilitas Kualitas Pendidikan	13	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,34 /Tahun
		14	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,65 /Tahun
10	Meningkatnya Derajat Kesehatan	15	Angka Harapan Hidup (tahun)	72,5
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	16	Nilai Capaian SAKIP	B
		17	Opini BPK	WTP
12	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	18	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%
13	Meningkatnya Rasa Aman dan Kepatuhan terhadap Hukum di Masyarakat	19	Persentase Pelanggaran PERDA yang ditangani	90%

BUPATI NUNUKAN

ttd

ASMIN LAURA HAFID

